

Nama : Sri Mursini,S.Pd  
No. Peserta : 20031115410096  
Prodi PPG : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)

---

**Lembar Kerja  
Peserta Didik**

<b>Sekolah</b>	:	SMP NEGERI 1 WERU
<b>Mata Pelajaran</b>	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
<b>Kelas/Semester</b>	:	VII (Tujuh) / I (satu)
<b>Kompetensi Dasar (KD)</b>	:	1.3. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk kedaulatan Negara Republik Indonesia. 2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara <b>3.3.</b> Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <b>4.3.</b> Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<b>Indikator Pencapaian Kompetensi</b>	:	3.3.1 Mendeskripsikan perumusan UUD Negara Republik Indonesia dalam Sidang Kedua BPUPKI. 3.3.2 Mendeskripsikan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3.1 Memiliki tanggungjawab untuk memahami UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara utuh
<b>Materi Pokok</b>	:	Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia 1945
<b>Sub Materi</b>	:	Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada sidang BPUPKI Kedua

### A. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan macam –macam dan fungsi Konstitusi dengan benar dan bertanggung jawab
2. Menganalisis pembentukan, keanggotaan, tugas dan hasil pembahasan Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar dengan benar
3. Dengan membaca buku paket dan referensi dari internet, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perumusan UUD Negara Republik Indonesia dalam Sidang Kedua BPUPKI.
4. Dengan membaca buku paket dan referensi dari internet, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dengan membaca buku paket dan mengamati tayangan video, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan nilai kesejarahan perumusan UUD

## **B. Petunjuk Belajar**

1. Cermati materi dalam buku paket, handout (rangkuman materi) atau pada sumber informasi pendukung lainnya (situs internet)!
2. Kerjakan soal secara berkelompok!
3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!
4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain!

## **C. Materi Pelajaran**

Konstitusi terbagi menjadi dua yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar Negara, bangun Negara dan tata Negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa didalam persekutuan hukum Negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga Konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah Negara (Budi Juliadi, 2015: 66-67). Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang. Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu.

Menurut seorang srjana hukum, E.C.S Wade undang-undang adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam Negara yang menganut paham demokrasi, Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang kas, yaiutu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak besifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga Negara akan lebih terlindung. Gagasan ini disebut degan konstitusionalisme (Miriam Budiardjo, 2002:96)

Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusialisme karangan Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa naskah UUD 1945 pertama kali di persiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli-17 Juli 1945, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk Negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19orang yang diketuai oleh Ir.Soekarno. kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang di ketuai oleh Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, H.Agus Salim dan Sukiman.

**Nama : Sri Mursini,S.Pd**  
**No. Peserta : 20031115410096**  
**Prodi PPG : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)**

---

Panitia kecil perancang undang-undang dasar, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim dan Soepomo. Rancangan undang-undang dasar diserahkan oleh Panitia Penghalus Bahasa.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Panitia perancangan undang-undang dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada lima pasal yang masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serata 1 pasal aturan tambahan.

Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara “ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar”. Saat itu Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.

Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya di terima dengan suara dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUKI dibubarkan oleh jepang yang kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zumbi Usakai). Untuk keperluan membentuk panitia itu maka pada tanggal 8 Agustus Ir. Soekarno, Drs. Muh. Hatta dan Dr. Radjiman di berangkatkan ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi.

Menurut Ir. Soekarno Jendral Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 antara lain memutuskan Ir. Soekarno di angkat sebagai ketua persiapan kemerdekaan. Drs. Muh. Hatta sebagai wakil ketua dan Dr.Radjiman Widjodiningrat sebagai anggota panitia persiapan, boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hanya mempunyai 21 orang anggota.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Soekarno mengumumkan di depan orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hadiah dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itulah maka ketua PPKI menambahkan 6 anggota baru yaitu:

1. R.AA Winatakoesoema
2. Ki Hadjar Dewantara
3. Kasiman Singodimedjo
4. Sayuti Melik

**Nama** : Sri Mursini,S.Pd  
**No. Peserta** : 20031115410096  
**Prodi PPG** : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)

---

5. Mr. iwa Kusuma Sumantri
6. Mr. Ahmad Soebardjo

Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945) menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
- c. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden.

Sidang kedua PPKI (19 Agustus 1945), menghasilkan beberapa perubahan sebagai berikut:

- a. Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan
- b. Sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- c. Perubahan pasal 6 UUD “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang asli Indonesia”

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan Tiga panitia kecil yang dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI !
2. Siapa tokoh yang berperan dalam panitia perancang UUD Negara Republik Indonesia 1945?
3. Analisislah Hubungan antara Panitia Kecil Perancang UUD dengan Panitia Perancang UUD Negara Republik Indonesia 1945!
4. Jelaskan kapan dan apa isi pembahasan sidang kedua BPUPKI!
5. Jelaskan Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
6. Analisislah Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945!